



Sinergi Bangun Ruang Terbuka Hijau

JOGJA - Kendala pembukaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jogja bakal segera selesai. Sebab, antara Pemprov DIJ dengan Pemkot Jogja sepakat bersinergi membuka lahan-lahan baru yang bisa menjadi RTH. Baik pemprov maupun pemkot juga berniat mencari dana pemerintah pusat untuk merealisasikan program tersebut.

Apalagi, saat ini RTH di Kota Jogja baru mencapai 17,9 persen. Masih kurang sekitar 2,1 persen atau 0,68 kilometer persegi untuk mewujudkan kuota minimal RTH ideal sebuah kota.

"Karena posisinya di tengah, kami akan lihat apa kebutuhan di wilayah, yang bisa disinkronkan dengan program pusat," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIJ Rani Sjamsinarsi saat peresmian pembangunan RTH di bantaran Sungai Gajah Wong RW 8 Pandeyan Umbulharjo, kemarin (6/11).

Rani menjelaskan, masalah di perkotaan adalah kurangnya ruang terbuka untuk berinteraksi masyarakat »

» Baca Sinergi... Hal 11

Realisasikan Kuota 20 Persen RTH

■ SINERGI...
Sambungan dari hal 1

Ini yang kemudian membentuk sikap-sikap individualistik di tengah masyarakat.

"Kebetulan di Kementerian PU ada program pembukaan ruang terbuka hijau yang bisa disalurkan ke daerah," lanjutnya.

Program dari Kementerian PU in cukup besar. DIJ mendapatkan dana Rp 1,5 miliar. Dana tersebut dibagi dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kota Jogja. Untuk Kota Jogja di Pandeyan RW 08 yang membuat RTH publik dengan memanfaatkan tanah milik pemkot seluas lima ribu meter persegi.

Selama ini, pemkot bekerja keras merealisasikan kuota 20

persen RTH publik tersebut. Tak hanya dengan memanfaatkan tanah-tanah kosong milik pemkot. Bagian Tata Pemerintahan juga terus menggarap pembukaan RTH publik dengan membeli tanah atas usulan RW.

Tahun ini, Bagian Tata Pemerintahan memproses dua usulan pembukaan lahan terbuka hijau. Kedua usulan tersebut datang dari Kelurahan Klitren dan Kelurahan Purwokinanti. Tanah di Kelurahan Klitren memiliki luas sekitar 700 meter persegi dan di Kelurahan Purwokinanti memiliki luas 300 meter persegi.

"Kami sebenarnya melaksanakan pembangunan berbasis usulan masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat, itu yang akan kami bangun," ucap Kepala Bappeda Kota Jogja Edy Muhammad.

Edy menegaskan, dengan berbasis masyarakat itu, pembangunan yang dilakukan pemkot sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sama seperti yang dilakukan masyarakat di bantaran Sungai Gajah Wong tersebut.

Warga yang tergabung dalam Forum Solidaritas Daerah Aliran Sungai (Foridas) telah memutuskan membangun bantaran sungai yang membatasi Kota Jogja dengan Kabupaten Bantul sebagai daerah penelitian.

"Jadi apa yang diinginkan masyarakat kami tangkap sebagai program pembangunan berbasis kewilayahan seperti RTH ini," jelasnya. (eri/kus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			
3. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 22 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005